Community Development
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev
E-ISSN : **2985-6841**
Vol. 10 No. 1 Tahun 2026 | 132 – 160
DOI: 10.21043/cdjpmi.v10i1.38434

Pendampingan Sadar Desa Wisata Berbasis Lima Dimensi bagi Pemuda Desa Kemujan Karimunjawa

Wahyu Khoiruz Zaman[1], Moh. Anwar Yasfin[2], Muhammad Siril Aufa[3]
[1]Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus
[2]Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus
[3]Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus
E-mail: [1)] wahyukz@uinsuku.ac.id [2)]myasfin@uinsuku.ac.id [2)]sifafasi2764@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan sadar desa wisata berbasis lima dimensi bagi pemuda Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Program yang dibiayai Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tahun 2024 ini dilaksanakan melalui dua kali kunjungan lapangan pada September 2024 dan melibatkan sekitar 35 pemuda dengan latar belakang beragam, termasuk pemuda umum dan pelaku wisata. Pendampingan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pemetaan potensi dan masalah, sosialisasi, pelatihan, Focus Group Discussion (FGD), penyusunan rencana aksi, dan evaluasi reflektif. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi, catatan FGD, dokumentasi, refleksi peserta, dan rencana aksi; kegiatan tidak menggunakan pre-test dan post-test. Hasil pendampingan menunjukkan indikasi penguatan cara pandang peserta dalam mengenali potensi lokal, pelayanan wisata, promosi digital, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan kolaborasi. FGD juga mengungkap persoalan koordinasi antaraktor serta persepsi peserta mengenai terbatasnya posisi masyarakat lokal dalam sebagian rantai ekonomi wisata, termasuk usaha akomodasi. Dari proses tersebut dirumuskan lima dimensi pendampingan, yaitu sadar potensi, sadar pelayanan, sadar digital, sadar lingkungan, dan sadar kolaborasi. Luaran utama berupa rencana aksi untuk merajut keterhubungan pemuda, pelaku wisata, dan pemerintah desa. Kerangka lima dimensi ini bersifat kontekstual dan memerlukan pendampingan jangka panjang serta pengujian pada lokasi lain.

Keyword: ***desa wisata; Karimunjawa; lima dimensi; pemberdayaan pemuda; pendampingan partisipatif.***

Abstract

This article analyses a community service program that developed a five-dimensional tourism-village awareness approach for young people in Kemujan Village,

Karimunjawa District, Jepara Regency. Funded through the 2024 State University Operational Assistance (BOPTN) scheme, the program was implemented through two field visits in September 2024 and involved approximately 35 young participants with diverse backgrounds, including general youth and tourism actors. A participatory approach was used through potential-and-problem mapping, socialization, training, Focus Group Discussion (FGD), action-plan formulation, and reflective evaluation. Evaluation was qualitative, drawing on observation, FGD notes, documentation, participant reflection, and the action plan; no pre-test or post-test was administered. The mentoring process indicated strengthened participant perspectives on local assets, tourism services, digital promotion, environmental sustainability, and the need for collaboration. The FGD also revealed coordination problems among local actors and participants' perceptions of limited local community positions within parts of the tourism value chain, including accommodation businesses. The process generated five dimensions of tourism-village awareness: potential, service, digital, environmental, and collaborative awareness. The main output was an action plan aimed at connecting youth, tourism actors, and the village government. This five-dimensional framework is contextual rather than a universally validated model and therefore requires longer-term mentoring and further testing in other tourism villages.

Keyword: ***Tourism Village; Karimunjawa; Five Dimensions; Youth Empowerment; Participatory Assistance.***

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam pemulihan dan penguatan ekonomi nasional setelah pandemi. Pergerakan wisatawan tidak hanya menghasilkan aktivitas rekreasi, tetapi juga menggerakkan jasa transportasi, akomodasi, kuliner, usaha kreatif, dan ekonomi lokal. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara pada 2023, sedangkan kebijakan pemulihan pariwisata diarahkan pada penguatan kesiapan destinasi dan pelaku lokal (Badan Pusat statistik, 2023; Purwowidhu, 2023). Dalam kerangka tersebut, desa wisata relevan karena menghubungkan pengembangan destinasi dengan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan desa wisata tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan objek atau memperbanyak promosi. Masyarakat lokal perlu memiliki kapasitas untuk mengenali aset, mengelola pengalaman wisata, menjaga lingkungan, mengorganisasi pelayanan, serta mengambil bagian dalam keputusan dan manfaat ekonomi. Gautama et al. (2020)

menempatkan pengembangan desa wisata dalam kerangka pemberdayaan, sedangkan Sayuti (2023) menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat pada destinasi pulau kecil dipengaruhi oleh modal ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Pada konteks pulau kecil, penguatan kapasitas lokal juga perlu berjalan bersama pengaturan tata kelola dan jejaring antarpihak (Nurhasanah & Van den Broeck, 2022).

Dalam perspektif pemberdayaan, desa wisata karena itu tidak semata-mata dipahami sebagai label destinasi, tetapi sebagai arena pengelolaan sumber daya yang menuntut kemampuan kolektif. Daya tarik alam atau budaya baru memperoleh nilai sosial-ekonomi ketika masyarakat mampu menerjemahkannya menjadi pengalaman yang dapat diakses, dipahami, dan dinikmati wisatawan tanpa menghilangkan kendali lokal atas arah pengembangan. Pada titik ini, kapasitas masyarakat mencakup kemampuan membaca aset, mengorganisasi pelayanan, menyusun aturan informal, menjaga lingkungan, dan membangun hubungan dengan aktor di luar desa. Gagasan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pentingnya posisi warga sebagai subjek dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat, bukan hanya sebagai tenaga pendukung kegiatan wisata (Rusyidi & Fedryansah, 2018). Dengan demikian, keberhasilan desa wisata tidak cukup dilihat dari peningkatan kunjungan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal memiliki ruang berpartisipasi, memperoleh manfaat, dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya yang menopang destinasi.

Kebutuhan tersebut semakin penting pada destinasi kepulauan. Ruang pulau memiliki keterbatasan ekologis, aksesibilitas yang bergantung pada transportasi laut, serta struktur ekonomi yang relatif sensitif terhadap perubahan arus wisata. Pada saat yang sama, popularitas destinasi dapat menarik modal, pelaku usaha, dan jaringan bisnis dari luar. Kehadiran aktor eksternal dapat memperluas investasi dan layanan, tetapi juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitas tawar masyarakat lokal dan distribusi manfaat ekonomi. Nurhasanah & Van den Broeck (2022) menunjukkan bahwa transformasi pariwisata pulau kecil membutuhkan *capacity building*, pengaturan tata kelola yang adaptif, serta penguatan posisi tawar masyarakat. Perspektif tersebut relevan untuk membaca Kemujan: pengembangan wisata bukan hanya perkara menambah produk, melainkan bagaimana pemuda dan masyarakat lokal dapat

mengambil posisi yang lebih aktif di dalam jaringan ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang terbentuk di sekitar destinasi.

Desa Kemujan merupakan salah satu desa di Kecamatan Karimunjawa yang memiliki aset wisata pesisir berupa pantai, mangrove, kehidupan nelayan, kuliner hasil laut, tradisi lokal, dan kerajinan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara mencatat penduduk Desa Kemujan pada 2023 sebanyak 3.319 jiwa, terdiri atas 1.706 laki-laki dan 1.613 perempuan, dengan kepadatan sekitar 176 jiwa per km² (Badan Pusat Statistik, 2023). Karakter kepulauan membuat pengembangan wisata di Kemujan terkait erat dengan akses transportasi, konektivitas, daya dukung lingkungan, dan kapasitas masyarakat lokal.

Dinamika pariwisata Karimunjawa pascapandemi memperlihatkan kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis dengan pemanfaatan teknologi. Pinem et al. (2021) menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata Karimunjawa memerlukan sinergi ketiga aspek tersebut dan dukungan teknologi informasi. Pada level Kemujan, Kurniawan et al. (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan pemasaran digital oleh sebagian pelaku usaha masih terbatas, sehingga pelatihan dan pendampingan digital dibutuhkan untuk memperluas jangkauan pasar.

Pemuda berada pada posisi strategis karena relatif dekat dengan media digital, memiliki energi sosial untuk menggerakkan kegiatan komunitas, dan berpotensi menjadi penghubung antara pengetahuan lokal dengan kebutuhan wisatawan. Kajian pengabdian yang lebih mutakhir di Karimunjawa juga memperlihatkan bahwa penguatan generasi muda tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga literasi bahasa, budaya, dan lingkungan. Prasetyo et al. (2024), misalnya, menunjukkan pentingnya penguatan kemampuan komunikasi, literasi ekokultural, dan kesadaran konservasi bagi generasi muda di Karimunjawa.

Namun, kedekatan pemuda dengan teknologi tidak serta-merta berarti mereka memiliki kapasitas pengelolaan wisata yang memadai. Penggunaan media sosial sehari-hari berbeda dengan kemampuan membangun komunikasi destinasi secara terencana. Promosi wisata menuntut pemilihan narasi, konsistensi informasi, pemahaman karakter audiens, kemampuan menampilkan keunikan lokal, dan kepekaan terhadap dampak promosi terhadap lingkungan serta kehidupan sosial. Oleh karena itu, literasi digital

perlu diletakkan sebagai bagian dari kapasitas yang lebih luas. Pemuda tidak hanya perlu mampu membuat konten, tetapi juga memahami apa yang layak dipromosikan, bagaimana informasi disampaikan secara bertanggung jawab, dan bagaimana promosi tersebut dihubungkan dengan kesiapan pelayanan di lapangan. Dalam konteks ini, media digital berfungsi sebagai penghubung antara aset desa, pengalaman wisata, dan jejaring pasar, bukan tujuan akhir dari pemberdayaan.

Posisi strategis pemuda juga terkait dengan fungsi mereka sebagai penghubung generasi dan aktor. Pemuda dapat menjembatani pengetahuan lokal yang dimiliki keluarga dan masyarakat dengan pola komunikasi wisatawan yang semakin digital. Akan tetapi, fungsi tersebut membutuhkan ruang kolaborasi. Tanpa koordinasi, kemampuan individual mudah terfragmentasi menjadi aktivitas yang berdiri sendiri dan tidak menghasilkan kapasitas kolektif. Karena itu, pemberdayaan pemuda dalam desa wisata perlu menggabungkan penguatan pengetahuan, keterampilan praktis, kesadaran ekologis, dan kemampuan membangun hubungan sosial. Prasetyo et al. (2024) memperlihatkan bahwa penguatan generasi muda Karimunjawa membutuhkan literasi bahasa dan ekokultural, sementara Suryandhani et al. (2023) menunjukkan pentingnya jaringan sosial bagi lahirnya aksi kolektif pada pengembangan desa wisata. Kedua perspektif tersebut menegaskan bahwa kapasitas pemuda perlu dibaca secara multidimensional.

Meskipun demikian, program-program pendampingan yang telah dilakukan cenderung menekankan aspek tertentu secara terpisah, seperti pemasaran digital, keterampilan komunikasi, atau literasi ekokultural. Pendekatan semacam itu penting, tetapi belum selalu menghubungkan secara terpadu pengenalan aset lokal, kualitas pelayanan, kapasitas digital, keberlanjutan lingkungan, dan kemampuan membangun kolaborasi. Celah inilah yang menjadi dasar kebutuhan pendampingan yang tidak berhenti pada transfer keterampilan, tetapi menyatukan dimensi kesadaran dan kapasitas kolektif pemuda.

Celah yang lebih spesifik terletak pada hubungan antar-kapasitas tersebut. Program yang kuat pada promosi digital belum tentu menghasilkan pelayanan yang lebih baik apabila informasi yang disebarkan tidak didukung kesiapan di lokasi. Pelatihan pelayanan juga tidak otomatis berkelanjutan apabila peserta tidak memiliki rasa

memiliki terhadap aset dan tidak terhubung dengan pemerintah desa atau pelaku wisata. Demikian pula, peningkatan kunjungan dapat menjadi kontraproduktif ketika kesadaran lingkungan tidak berjalan seiring dengan promosi. Dengan kata lain, kebutuhan pendampingan bukan sekadar menambah daftar keterampilan, tetapi menyusun hubungan logis antarketerampilan dan kesadaran sehingga peserta dapat memahami desa wisata sebagai satu ekosistem. Dari sinilah gagasan lima dimensi dalam artikel ini memperoleh relevansinya: setiap dimensi mempunyai fungsi berbeda, tetapi manfaatnya muncul ketika kelimanya dibangun secara saling terkait.

Dalam artikel ini, sadar desa wisata dipahami sebagai kemampuan pemuda untuk membaca potensi desa sebagai aset bersama, menempatkan pelayanan sebagai bagian dari pengalaman wisata, menggunakan media digital secara terarah, menjaga daya dukung lingkungan, serta membangun kerja sama dengan pemerintah desa dan pelaku wisata. Lima unsur tersebut kemudian dirumuskan sebagai sadar potensi, sadar pelayanan, sadar digital, sadar lingkungan, dan sadar kolaborasi. Kelimanya diposisikan sebagai kerangka konseptual-operasional yang tumbuh dari proses pendampingan, bukan sebagai model universal yang telah tervalidasi secara statistik.

Orientasi tersebut juga menempatkan pemberdayaan sebagai proses memperluas ruang partisipasi pemuda. Pemberdayaan tidak hanya diukur dari terlaksananya pelatihan, tetapi dari kemampuan peserta mengidentifikasi masalah, menyampaikan pengalaman, merumuskan gagasan, dan menyusun tindak lanjut. Prinsip ini sejalan dengan pariwisata berbasis masyarakat yang menempatkan warga lokal sebagai subjek perencanaan dan pengelolaan, bukan sekadar penerima manfaat (Rusyidi & Fedryansah, 2018; Kiss et al., 2022).

Berdasarkan konteks tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses pendampingan sadar desa wisata bagi pemuda Kemujan, mengidentifikasi indikasi perubahan pemahaman dan kapasitas awal peserta, merumuskan kerangka lima dimensi pendampingan, serta menelaah tantangan kolaborasi dan keberlanjutan program. Artikel ini tidak mengklaim pengukuran dampak kausal, melainkan menyajikan pembelajaran berbasis proses dan bukti kualitatif dari kegiatan pengabdian.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tahun 2024 di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Pelaksanaan lapangan dilakukan melalui dua kali kunjungan pada September 2024 dengan melibatkan sekitar 35 pemuda. Peserta berasal dari latar yang beragam, termasuk pemuda umum dan pemuda yang terlibat dalam aktivitas pariwisata. Pemerintah desa dan aktor lokal juga terlibat sebagai mitra diskusi, terutama pada tahap identifikasi masalah dan pembicaraan tindak lanjut.

Pemilihan peserta bersifat purposif-praktis sesuai karakter kegiatan pengabdian. Tim mengundang pemuda yang memiliki minat terhadap pengembangan desa dan pariwisata, baik yang telah bersentuhan dengan aktivitas wisata maupun yang belum terlibat secara intensif. Komposisi sekitar 35 peserta dimaksudkan untuk menghadirkan keragaman pengalaman, bukan membentuk sampel statistik. Karena itu, data yang dihasilkan dibaca sebagai representasi pengalaman peserta kegiatan, bukan sebagai gambaran kuantitatif seluruh pemuda Desa Kemujan. Posisi ini penting untuk menjaga kesesuaian antara desain pengabdian dan batas klaim artikel.

Pendampingan menggunakan pendekatan partisipatif. Istilah partisipatif digunakan secara deskriptif untuk menegaskan keterlibatan peserta dalam mengidentifikasi persoalan, memetakan potensi, menyampaikan pengalaman, dan merumuskan rencana aksi. Kegiatan ini tidak dirancang sejak awal sebagai *Participatory Action Research* (PAR), *Asset-Based Community Development* (ABCD), atau *Service-Learning* dengan siklus metodologis formal masing-masing; karena itu, artikel tidak memberi label metodologis yang tidak didukung oleh desain program. Prinsip partisipasi yang digunakan sejalan dengan gagasan pariwisata berbasis masyarakat dan tata kelola yang melibatkan warga (Rusyidi & Fedryansah, 2018; Kiss et al., 2022).

Rancangan kegiatan terdiri atas enam tahap, yaitu pemetaan awal potensi dan masalah, sosialisasi sadar desa wisata, pelatihan pengelolaan dan promosi, *Focus Group Discussion* (FGD), pendampingan penyusunan rencana aksi, serta evaluasi reflektif. Keenam tahap tersebut didistribusikan dalam dua kunjungan lapangan. Catatan program

tidak memisahkan durasi jam setiap tahap secara rinci; oleh karena itu, artikel melaporkan urutan dan substansi kegiatan tanpa mengonstruksi durasi yang tidak terdokumentasi.

Pemetaan awal dilakukan melalui observasi lapangan, percakapan informal, dan penggalian pengalaman peserta mengenai aset wisata, aksesibilitas, pelayanan, promosi, kondisi lingkungan, serta relasi antaraktor. Sosialisasi dan pelatihan diarahkan pada pengenalan potensi, pelayanan wisatawan, penyusunan gagasan paket wisata sederhana, promosi digital, dan kepedulian lingkungan. FGD berfungsi sebagai ruang untuk mengidentifikasi persoalan prioritas, termasuk koordinasi antarpemuda, hubungan dengan pelaku wisata, posisi masyarakat lokal dalam ekonomi pariwisata, dan peluang kolaborasi. Penggunaan FGD sebagai proses kelompok relevan untuk identifikasi masalah dan perencanaan program secara partisipatif (Delbecq & Van de Ven, 1971).

Sumber data kegiatan meliputi catatan observasi, dokumentasi kegiatan, catatan diskusi dan FGD, refleksi peserta, serta dokumen rencana aksi. Bahan pendampingan meliputi materi presentasi, lembar pemetaan potensi, lembar diskusi kelompok, contoh konten promosi digital, dan perangkat dokumentasi. Data tersebut diperlakukan sebagai bukti proses pengabdian, bukan sebagai data eksperimen.

Keabsahan interpretasi dijaga melalui pembandingan antarsumber bukti yang tersedia. Pernyataan peserta dalam FGD tidak langsung diperlakukan sebagai fakta objektif mengenai kondisi desa, tetapi dibandingkan dengan catatan observasi, percakapan selama kegiatan, dokumentasi, dan konteks yang muncul pada tahap pemetaan. Prinsip ini terutama diterapkan pada isu yang sensitif, seperti persepsi mengenai dominasi aktor luar dalam sebagian usaha wisata. Artikel hanya melaporkan isu tersebut sebagai persepsi dan pengalaman yang muncul dalam forum, bukan sebagai hasil audit kepemilikan atau pemetaan ekonomi. Cara ini dipilih agar pembahasan tetap menangkap problem sosial yang dirasakan peserta tanpa melampaui kekuatan data yang dimiliki.

Proses analisis dilakukan dalam beberapa langkah. Pertama, catatan kegiatan dan FGD dibaca kembali untuk mengidentifikasi unit informasi yang berkaitan dengan potensi desa, pelayanan, digitalisasi, lingkungan, koordinasi, dan keberlanjutan. Kedua, unit informasi dikelompokkan ke dalam tema yang berulang. Ketiga, tema

dibandingkan dengan tujuan setiap tahap pendampingan dan indikator evaluasi. Keempat, hubungan antartema ditafsirkan dengan menggunakan literatur pemberdayaan, pariwisata berbasis masyarakat, mentoring, dan aksi kolektif. Dari proses tersebut, lima dimensi tidak diperlakukan sebagai kategori yang dipaksakan sejak awal, melainkan sebagai sintesis konseptual yang membantu merangkum persoalan dan arah penguatan kapasitas yang muncul selama kegiatan. Karena dokumentasi program tidak dibangun sebagai penelitian longitudinal, analisis lebih menekankan konsistensi makna antar-bukti daripada frekuensi kemunculan atau ukuran statistik.

Evaluasi dilakukan secara kualitatif dan tidak menggunakan pre-test, post-test, maupun instrumen kuantitatif untuk mengukur perubahan skor. Karena itu, istilah keberhasilan dalam artikel ini merujuk pada ketercapaian indikator proses dan luaran yang dapat diamati, seperti kemampuan peserta mengidentifikasi aset dan masalah, merumuskan gagasan pelayanan dan promosi, berpartisipasi dalam FGD, serta menyusun rencana tindak lanjut. Kriteria evaluasi dan sumber bukti diringkas pada Tabel 2.

Tabel 1 Tahapan Kegiatan Pendampingan Sadar Desa Wisata

Tahap	Kegiatan	Tujuan	Luaran/Bukti Proses
1	Pemetaan Awal Potensi dan Masalah	Mengenali aset wisata, aktor lokal, dan persoalan prioritas pemuda	Daftar potensi dan masalah yang teridentifikasi
2	Sosialisasi Sadar Desa Wisata	Membangun pemahaman tentang nilai ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis pariwisata	Catatan diskusi dan respons peserta
3	Pelatihan Pengelolaan dan Promosi	Menguatkan pemahaman pelayanan, paket wisata sederhana, dan promosi digital	Latihan/gagasan pelayanan dan promosi
4	*Focus Group Discussion*	Merumuskan masalah prioritas, dinamika lokal, dan peluang kolaborasi	Catatan isu, pengalaman peserta, dan kebutuhan kolaborasi

Tahap	Kegiatan	Tujuan	Luaran/Bukti Proses
5	Pendampingan Rencana Aksi	Membantu peserta merumuskan tindak lanjut yang realistis	Rencana aksi yang menghubungkan pemuda, pelaku wisata, dan pemerintah desa
6	Evaluasi reflektif	Menilai ketercapaian proses dan kebutuhan tindak lanjut	Refleksi peserta dan catatan komitmen keberlanjutan

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui reduksi catatan kegiatan, pengelompokan tema, perbandingan kondisi awal yang teridentifikasi dengan indikasi perubahan selama pendampingan, dan interpretasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan wisata, serta aksi kolektif. Kategori utama analisis meliputi kesadaran terhadap potensi, kapasitas pelayanan dan digital, kepedulian lingkungan, partisipasi-kolaborasi, serta keberlanjutan program.

Tabel 2 Indikator dan Kriteria Evaluasi Program

Aspek Evaluasi	Indikator	Kriteria Keberhasilan Kualitatif	Sumber Bukti
Kesadaran Potensi	Peserta mampu mengenali aset, persoalan, dan nilai keberlanjutan desa wisata	Peserta dapat menyebutkan aset lokal dan menjelaskan peluang maupun risikonya dalam diskusi	Observasi, FGD, refleksi peserta
Kapasitas Pelayanan dan Digital	Peserta memahami prinsip pelayanan, narasi destinasi, paket wisata sederhana, dan promosi digital	Muncul gagasan pelayanan/promosi yang lebih terarah dan sesuai konteks Kemujan	Catatan pelatihan, simulasi, dokumentasi
Partisipasi dan Kolaborasi	Peserta aktif mengidentifikasi masalah dan merumuskan pembagian peran/jejaring	Isu koordinasi terartikulasikan dan terdapat kesepakatan awal mengenai kebutuhan kerja bersama	Daftar hadir, FGD, catatan pendampinga n
Keberlanjutan	Tersusun tindak lanjut dan terdapat komitmen aktor lokal	Tersedia rencana aksi serta komitmen pemuda dan pemerintah desa untuk melanjutkan komunikasi/kolaborasi	Rencana aksi, evaluasi akhir, catatan refleksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Kondisi Awal dan Persoalan Strategis Pengembangan Wisata Kemujan

Desa Kemujan berada di kawasan Kepulauan Karimunjawa dengan karakter sosial-ekologis pulau kecil. Data 2023 menunjukkan jumlah penduduk 3.319 jiwa dan kepadatan sekitar 176 jiwa per km² (Badan Pusat statistik Kabupaten Jepara, 2023). Kehidupan masyarakat berhubungan dengan sektor kelautan, perikanan, jasa, dan pariwisata. Potensi wisata yang dikenali selama pemetaan meliputi pantai, mangrove, kehidupan masyarakat pesisir, kuliner hasil laut, tradisi lokal, dan berbagai cerita yang dapat dikembangkan menjadi narasi destinasi.

Kondisi awal memperlihatkan bahwa peserta telah mengenal objek wisata dan aktivitas pariwisata di sekitar mereka, tetapi pengetahuan tersebut belum selalu terorganisasi menjadi kerangka pengelolaan bersama. Sebagian potensi dipandang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sebagai aset yang memerlukan narasi, pelayanan, perlindungan lingkungan, dan pembagian peran. Temuan ini sejalan dengan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat pulau kecil yang tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga kesiapan sosial, pengetahuan, dan jejaring pemangku kepentingan (Sayuti, 2023).

Kedekatan peserta dengan objek wisata memiliki dua sisi. Di satu sisi, pengetahuan lokal memberikan modal yang tidak dimiliki oleh pihak luar: peserta mengenali lokasi, kebiasaan masyarakat, ritme kehidupan pesisir, serta cerita yang melekat pada ruang sehari-hari. Di sisi lain, kedekatan tersebut dapat membuat sebagian aset dianggap terlalu biasa sehingga belum dibaca sebagai pengalaman yang memiliki nilai bagi wisatawan. Pendampingan karena itu berupaya mengubah sudut pandang dari sekadar 'mengetahui tempat' menjadi 'memahami nilai, cerita, dan cara mengelolanya'. Perubahan orientasi ini penting karena daya tarik desa wisata tidak selalu lahir dari objek baru; ia dapat tumbuh dari kemampuan masyarakat menginterpretasikan kembali aset yang telah lama hadir di sekitar mereka.

Pembacaan aset juga menegaskan bahwa potensi wisata Kemujan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat pesisir. Pantai dan mangrove berhubungan dengan ekologi, mata pencaharian, akses ruang, dan pengetahuan lokal. Kuliner hasil laut terhubung dengan rantai produksi rumah tangga serta identitas masyarakat. Tradisi dan cerita lokal memiliki fungsi sosial sebelum ditempatkan sebagai atraksi. Karena itu, proses identifikasi potensi diarahkan agar peserta tidak sekadar membuat daftar objek, tetapi mempertimbangkan makna sosial dan batas pemanfaatannya. Pendekatan ini menghindari kecenderungan menjadikan seluruh aspek kehidupan desa sebagai komoditas wisata tanpa pertimbangan etika dan keberlanjutan.

Aspek digital juga muncul sebagai persoalan praktis. Studi Kurniawan et al. (2023) di Desa Kemujan menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih terbatas dalam memanfaatkan pemasaran daring. Dalam pendampingan ini, peserta juga memperlihatkan pemahaman promosi yang belum terstruktur; media sosial lebih sering dipahami sebagai ruang unggahan daripada sebagai instrumen narasi destinasi, informasi layanan, dan edukasi wisatawan. Hal tersebut menguatkan kebutuhan untuk menempatkan literasi digital sebagai salah satu dimensi pendampingan, bukan sebagai satu-satunya tujuan.

FGD memperlihatkan bahwa tantangan Kemujan juga bersifat relasional dan struktural. Peserta menyampaikan bahwa koordinasi antarpemuda dan antaraktor lokal belum selalu mudah. Sebagian peserta juga mempersepsikan bahwa sejumlah usaha akomodasi dan aktivitas ekonomi wisata lebih kuat dikelola oleh pihak dari luar desa, sehingga pertumbuhan wisata tidak otomatis memperkuat posisi ekonomi pemuda dan masyarakat lokal. Temuan ini dicatat sebagai persepsi peserta dalam FGD dan tidak diverifikasi sebagai pemetaan kepemilikan usaha. Meskipun demikian, isu tersebut penting karena memperlihatkan bahwa pemberdayaan lokal memerlukan kemampuan membangun jejaring, ruang negosiasi, dan kerja kolektif, bukan hanya keterampilan promosi.

Isu posisi aktor lokal dalam rantai ekonomi wisata menjadi penting karena membuka pembicaraan mengenai siapa yang memperoleh manfaat ketika pariwisata tumbuh. Peserta tidak menolak keberadaan pelaku dari luar desa, tetapi pengalaman yang mereka sampaikan menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lokal

agar pemuda tidak hanya menjadi pekerja atau penonton. Dalam konteks pemberdayaan, persoalan utamanya bukan asal geografis pelaku usaha, melainkan kemampuan masyarakat desa untuk mengakses peluang, masuk ke rantai nilai, membangun usaha atau layanan, serta terlibat dalam keputusan yang memengaruhi ruang hidup mereka. Oleh sebab itu, penguatan pemuda perlu diarahkan pada kapasitas yang membuat mereka mampu berjejaring dan bernegosiasi, bukan hanya memproduksi konten promosi.

Pada destinasi pulau kecil, persoalan tersebut berkelindan dengan kerentanan lingkungan. Pengembangan wisata dapat membuka peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap mangrove, pantai, terumbu karang, sampah, dan sumber daya lokal. Kajian Nurhasanah & Van den Broeck (2022) menegaskan pentingnya capacity building, kolaborasi lintas tingkat, dan penguatan posisi tawar masyarakat dalam transformasi pariwisata pulau kecil. Karena itu, konteks Kemujan membutuhkan pendampingan yang menghubungkan aset, pelayanan, digitalisasi, lingkungan, dan kolaborasi secara terpadu.

2 Kerangka Pendampingan Sadar Desa Wisata Berbasis Lima Dimensi

Berdasarkan pemetaan awal, materi pendampingan, interaksi selama pelatihan, dan isu yang muncul dalam FGD, proses pengabdian dirumuskan ke dalam lima dimensi sadar desa wisata: sadar potensi, sadar pelayanan, sadar digital, sadar lingkungan, dan sadar kolaborasi. Lima dimensi ini tidak dimaksudkan sebagai model baku yang telah diuji secara statistik, melainkan sebagai kerangka konseptual-operasional untuk membaca kebutuhan pendampingan pemuda di Kemujan.

Sadar potensi menempatkan aset alam, budaya, kuliner, dan kehidupan sosial sebagai sumber pengalaman wisata yang perlu dikenali dan dinarasikan. Sadar pelayanan menekankan keramahan, kejelasan informasi, keamanan, dan kenyamanan. Sadar digital mengarahkan pemuda untuk menggunakan media sosial secara lebih terencana. Sadar lingkungan menghubungkan kualitas destinasi dengan kebersihan, konservasi, dan etika kunjungan. Sadar kolaborasi menegaskan bahwa manfaat wisata membutuhkan jaringan kerja antara pemuda, pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku wisata.

Sadar potensi merupakan fondasi karena pilihan tindakan bergantung pada kemampuan mengenali apa yang dimiliki desa dan bagaimana aset tersebut bernilai. Pada tahap ini, peserta diarahkan untuk membedakan antara aset yang dapat dipromosikan secara luas, aset yang membutuhkan pengelolaan lebih dahulu, dan aspek kehidupan lokal yang perlu dijaga agar tidak kehilangan makna sosialnya. Kesadaran potensi juga mencakup kemampuan menghubungkan satu aset dengan aset lain sehingga pengalaman wisata tidak berhenti pada kunjungan ke satu titik, tetapi dapat dirangkai melalui cerita, kuliner, interaksi sosial, dan pengetahuan lingkungan. Dengan demikian, sadar potensi bukan kegiatan inventarisasi semata, melainkan proses menilai kemungkinan, batas, dan narasi yang menyertai aset lokal.

Sadar pelayanan merupakan jembatan antara keberadaan aset dan pengalaman wisatawan. Destinasi yang menarik dapat menghasilkan pengalaman negatif apabila informasi tidak jelas, komunikasi kurang ramah, keselamatan diabaikan, atau alur kunjungan tidak tertata. Dalam pendampingan, pelayanan dipahami secara sederhana dan realistis sesuai kapasitas lokal: kemampuan memberi informasi, membantu tamu memahami lokasi, memperhatikan kenyamanan, serta menyusun alur kunjungan yang masuk akal. Orientasi ini penting karena pemuda sering lebih tertarik pada promosi, sementara kualitas pengalaman di lapangan menentukan apakah citra digital yang dibangun dapat dipertahankan.

Sadar digital tidak direduksi menjadi kemampuan menggunakan aplikasi. Dimensi ini mencakup kesadaran bahwa setiap konten membentuk ekspektasi wisatawan. Foto, video pendek, caption, informasi akses, dan narasi budaya perlu konsisten dengan kondisi lapangan. Konten yang menarik tetapi tidak akurat berpotensi menciptakan kekecewaan, sedangkan promosi yang tidak mempertimbangkan daya dukung dapat mendorong kunjungan tanpa kesiapan pengelolaan. Karena itu, pemanfaatan digital ditempatkan setelah pemahaman potensi dan beriringan dengan pelayanan serta lingkungan. Posisi ini sekaligus membedakan digitalisasi sebagai instrumen pemberdayaan dari digitalisasi yang semata mengejar visibilitas.

Sadar lingkungan memperoleh bobot khusus karena Kemujan merupakan bagian dari ekosistem kepulauan yang sensitif. Kebersihan pantai, keberadaan mangrove, kualitas perairan, pengelolaan sampah, dan perilaku wisatawan berhubungan langsung

dengan keberlanjutan daya tarik. Peserta didorong untuk melihat lingkungan bukan sebagai latar belakang visual promosi, melainkan sebagai modal ekologis yang memiliki batas. Perspektif ini selaras dengan literasi ekokultural yang menempatkan pengetahuan lingkungan dan budaya sebagai satu kesatuan dalam penguatan generasi muda Karimunjawa (Prasetyo et al., 2024). Dengan demikian, promosi destinasi perlu berjalan bersama pesan dan praktik kunjungan yang bertanggung jawab.

Sadar kolaborasi menjadi dimensi pengikat. Potensi, pelayanan, digitalisasi, dan lingkungan melibatkan aktor yang berbeda sehingga tidak mungkin dikelola oleh satu orang atau satu kelompok. Pemerintah desa memiliki fungsi kebijakan dan fasilitasi; pelaku wisata memiliki pengalaman pasar; masyarakat memegang pengetahuan lokal; sedangkan pemuda memiliki energi, fleksibilitas, dan kedekatan dengan teknologi. Pendampingan menempatkan kolaborasi sebagai kemampuan menghubungkan sumber daya tersebut melalui komunikasi, pembagian peran, dan agenda bersama. Ketika koordinasi lemah, empat dimensi lain mudah berhenti sebagai keterampilan personal. Sebaliknya, kerja kolektif membuka peluang agar kapasitas individual menjadi program desa yang lebih berkelanjutan.

Tabel 3 Kerangka Lima Dimensi Pendampingan Sadar Desa Wisata

Dimensi	Masalah yang Direspons	Fokus Pendampingan	Orientasi Luaran
Sadar potensi	Aset lokal dianggap biasa dan belum dinarasikan sebagai pengalaman wisata	Pemetaan alam, budaya, kuliner, dan kehidupan sosial	Peserta mampu membaca aset desa secara lebih strategis
Sadar pelayanan	Pelayanan dan informasi wisata belum terorganisasi	Keramahan, informasi, keamanan, kenyamanan, itinerary sederhana	Muncul gagasan pelayanan yang lebih terarah
Sadar digital	Promosi sporadis dan belum berbasis narasi destinasi	Konten visual, caption, informasi akses, konsistensi publikasi	Promosi dipahami sebagai komunikasi destinasi, bukan sekadar unggahan
Sadar lingkungan	Dampak wisata belum selalu dikaitkan dengan kualitas destinasi	Kebersihan, mangrove, sampah, etika kunjungan, konservasi	Muncul keterkaitan antara keberlanjutan ekologis dan kualitas wisata

Dimensi	Masalah yang Direspons	Fokus Pendampingan	Orientasi Luaran
Sadar kolaborasi	Koordinasi antaraktor sulit dan posisi lokal belum kuat	Jejaring pemuda, pemerintah desa, pelaku wisata, pembagian peran	Rencana aksi dan kebutuhan penguatan kerja kolektif

Tabel 4 Alur Konseptual Pendampingan Sadar Desa Wisata Berbasis Lima Dimensi

INPUT	PROSES PARTISIPATIF	LIMA DIMENSI	TINDAK LANJUT	*OUTCOME* AWAL
Aset lokal + masalah pelayanan, digital, lingkungan, dan koordinasi	Pemetaan → sosialisasi/pelatihan → FGD → refleksi	Sadar potensi • pelayanan • digital • lingkungan • kolaborasi	Rencana aksi + perajutan jejaring pemuda, pelaku wisata, dan pemerintah desa	Pemahaman lebih terstruktur + komitmen kolaborasi

Kerangka tersebut bekerja secara saling terhubung. Sadar potensi menjadi titik awal untuk mengidentifikasi apa yang bernilai; sadar pelayanan menerjemahkan aset menjadi pengalaman wisata; sadar digital memperluas jangkauan informasi; sadar lingkungan menjaga basis ekologis destinasi; sedangkan sadar kolaborasi menjadi prasyarat agar tiga ranah sebelumnya tidak berhenti pada kemampuan individual. Relasi ini sejalan dengan literatur mentoring yang menempatkan pendampingan sebagai relasi belajar untuk mengembangkan kapasitas, bukan sekadar transfer pengetahuan (Mullen & Klimaitis, 2021).

Hubungan antardimensi dapat dibaca sebagai siklus, bukan urutan linear yang kaku. Pengenalan potensi dapat memunculkan kebutuhan pelayanan; pengalaman pelayanan dapat menunjukkan kekurangan informasi digital; promosi digital dapat meningkatkan perhatian pada kebersihan dan daya dukung; sementara problem lingkungan atau pelayanan dapat mendorong kebutuhan koordinasi. Pada saat yang sama, kolaborasi dapat memperbarui cara masyarakat membaca potensi karena aktor yang berbeda

membawa pengetahuan dan kepentingan yang berbeda. Karena itu, kerangka lima dimensi sebaiknya digunakan sebagai alat diagnosis dan perencanaan: fasilitator dapat menilai dimensi mana yang paling lemah, lalu merancang kegiatan yang menghubungkannya dengan dimensi lain.

Kontribusi utama kerangka lima dimensi terletak pada integrasi aspek yang pada banyak program pendampingan sering dipisahkan. Studi Kurniawan et al. (2023) menekankan *digital marketing*, sedangkan Prasetyo et al. (2024) menonjolkan literasi bahasa, budaya, dan lingkungan generasi muda Karimunjawa. Pendampingan di Kemujan menghubungkan aspek-aspek tersebut dengan pelayanan dan kolaborasi sehingga pemuda tidak hanya diarahkan menjadi promotor destinasi, tetapi juga aktor lokal yang mampu membaca manfaat, risiko, dan relasi kekuasaan dalam pengembangan wisata.

Kerangka lima dimensi karena itu harus dibaca sebagai hasil sintesis pengalaman pendampingan dan konteks lokal Kemujan. Validitasnya belum diuji melalui eksperimen, pengukuran longitudinal, atau perbandingan lintarlokasi. Pembatasan klaim ini penting agar istilah kerangka tidak disamakan dengan model universal yang telah tervalidasi.

3 Transformasi Cara Pandang dan Kapasitas Awal Pemuda

Proses pendampingan menunjukkan perubahan terutama pada cara peserta mengorganisasi pengetahuan yang sebelumnya tersebar. Dalam diskusi awal, peserta dapat menyebutkan pantai, mangrove, kuliner, tradisi, dan aktivitas masyarakat, tetapi belum selalu menghubungkannya dengan pengalaman wisata, layanan, promosi, dan keberlanjutan. Setelah proses pemetaan dan refleksi, aset tersebut mulai dibicarakan sebagai bagian dari pengalaman destinasi yang membutuhkan narasi dan pengelolaan.

Secara analitis, indikasi perubahan dapat dibaca pada tiga tingkat. Pertama adalah tingkat kognitif, yaitu perubahan dalam cara peserta memberi makna pada potensi desa. Aset yang semula dipahami secara terpisah mulai dibicarakan sebagai bagian dari sistem destinasi. Kedua adalah tingkat praktis, yakni munculnya kemampuan awal untuk merumuskan bentuk pelayanan, informasi, promosi, dan paket kunjungan sederhana. Ketiga adalah tingkat relasional, yaitu tumbuhnya kesadaran

bahwa pengelolaan wisata memerlukan koordinasi antarpemuda, pelaku wisata, masyarakat, dan pemerintah desa. Ketiga tingkat ini tidak menunjukkan perubahan perilaku yang permanen, tetapi memberikan gambaran mengenai arah penguatan kapasitas yang muncul selama proses pendampingan.

Pada aspek pelayanan, peserta mendiskusikan kebutuhan wisatawan berupa informasi yang jelas, keramahan, keamanan, kenyamanan, serta keteraturan kunjungan. Pendampingan tidak menghasilkan sertifikasi keterampilan atau skor kompetensi, tetapi memunculkan kemampuan awal untuk merumuskan gagasan itinerary dan paket wisata sederhana dengan mempertimbangkan lokasi, waktu, pengalaman, dan informasi destinasi.

Diskusi pelayanan juga memperlihatkan bahwa pemuda perlu menghubungkan perspektif wisatawan dengan realitas desa. Informasi yang dianggap biasa oleh warga lokal—misalnya akses menuju lokasi, waktu tempuh, kondisi jalan, kebutuhan transportasi, aturan setempat, atau karakter cuaca—dapat menjadi informasi penting bagi pengunjung. Dengan demikian, kemampuan pelayanan tidak selalu membutuhkan fasilitas mahal, tetapi membutuhkan ketelitian dalam melihat kebutuhan orang yang tidak memiliki pengetahuan lokal. Proses ini membantu peserta memahami bahwa kualitas destinasi dibentuk oleh detail pengalaman sebelum, selama, dan setelah kunjungan.

Pada aspek digital, peserta mulai melihat media sosial sebagai alat komunikasi destinasi. Konten dinilai tidak cukup hanya menampilkan foto, tetapi perlu dilengkapi narasi, informasi akses, pesan lingkungan, dan ajakan berkunjung secara bertanggung jawab. Perspektif ini relevan dengan temuan Kurniawan et al. (2023) mengenai perlunya penguatan pemasaran digital di Kemujan serta dengan Tuten (2023) yang menekankan konsistensi dan relevansi konten dalam interaksi media sosial.

Dalam konteks pelatihan, penguatan digital diarahkan pada cara berpikir sebelum keterampilan teknis. Peserta didorong untuk memikirkan siapa audiens yang ingin dijangkau, pesan apa yang perlu ditampilkan, informasi apa yang harus disertakan, dan bagaimana narasi digital tetap menghormati kondisi lokal. Latihan seperti pemilihan sudut foto, penyusunan caption, pengenalan video pendek, dan pengorganisasian informasi digunakan sebagai media untuk memperlihatkan bahwa promosi digital

memerlukan konsistensi. Karena kegiatan tidak melakukan pemantauan akun media sosial setelah pendampingan, artikel tidak menyatakan adanya peningkatan jangkauan atau engagement; capaian yang dapat dipertanggungjawabkan terbatas pada penguatan pemahaman dan kemampuan awal selama kegiatan.

FGD menjadi bagian penting karena peserta tidak hanya menerima materi, tetapi mengartikulasikan masalah yang mereka hadapi. Diskusi mengangkat keterbatasan fasilitas, kebersihan, koordinasi, kebutuhan informasi wisata, dan posisi masyarakat lokal dalam rantai ekonomi pariwisata. Dengan demikian, perubahan yang paling dapat dipertanggungjawabkan dari kegiatan ini bukan peningkatan skor, melainkan indikasi penguatan kemampuan peserta dalam membaca desa wisata sebagai ekosistem yang menghubungkan aset, layanan, teknologi, lingkungan, dan relasi sosial.

Aspek lingkungan muncul bukan sebagai topik tambahan, tetapi sebagai koreksi terhadap orientasi pertumbuhan wisata yang terlalu berpusat pada jumlah kunjungan. Peserta diajak mempertimbangkan bahwa daya tarik utama Kemujan justru bergantung pada kualitas ekosistem. Bila promosi berhasil meningkatkan kunjungan tetapi sampah, tekanan pada pantai, atau kerusakan mangrove tidak dikelola, maka keberhasilan pemasaran dapat mengurangi kualitas destinasi itu sendiri. Cara pandang ini mendorong hubungan yang lebih erat antara sadar digital dan sadar lingkungan: konten promosi idealnya tidak hanya mengundang wisatawan, tetapi juga menyampaikan etika kunjungan dan kepedulian terhadap ruang hidup masyarakat.

Dengan demikian, capaian proses tidak terletak pada penguasaan satu keterampilan tertentu, melainkan pada kemampuan peserta menghubungkan persoalan yang sebelumnya dilihat secara terpisah. Promosi dikaitkan dengan pelayanan; pelayanan dikaitkan dengan kesiapan destinasi; destinasi dikaitkan dengan lingkungan; dan seluruhnya dikaitkan dengan kebutuhan koordinasi. Pola hubungan ini merupakan dasar utama perumusan kerangka lima dimensi. Ia memberikan bahasa bersama yang relatif sederhana sehingga berbagai persoalan dapat dibahas tanpa memerlukan istilah teknis yang terlalu jauh dari pengalaman peserta.

Rencana aksi menjadi luaran konkret utama. Peserta bersama tim pendamping merumuskan kebutuhan untuk merajut keterhubungan antara pemuda, pelaku wisata, dan pemerintah desa agar gagasan pengembangan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Rencana tersebut masih bersifat awal dan belum berbentuk program kelembagaan formal, tetapi menunjukkan pergeseran dari orientasi individual menuju kebutuhan kerja bersama.

Temuan kualitatif tersebut diringkas pada Tabel 4. Istilah "indikasi perubahan" digunakan karena program tidak melakukan pengukuran sebelum-sesudah secara kuantitatif. Bukti yang tersedia berupa catatan observasi, diskusi, dokumentasi, refleksi, dan rencana aksi.

4 Dinamika Kolaborasi, Aksi Kolektif, dan Keberlanjutan

Sadar kolaborasi menjadi dimensi paling penting untuk membaca tantangan lanjutan. Peserta menyampaikan bahwa koordinasi antaraktor tidak selalu mudah, sementara sebagian aktivitas ekonomi wisata dipersepsikan lebih banyak dikendalikan oleh aktor dari luar desa. Situasi ini membuat peningkatan kemampuan individual belum tentu otomatis menghasilkan penguatan posisi masyarakat lokal. Karena itu, rencana aksi diarahkan terutama pada perajutan jejaring dan pembentukan ruang komunikasi antara pemuda, pemerintah desa, serta pelaku wisata.

Dalam perspektif aksi kolektif, keberhasilan desa wisata bergantung pada kemampuan mengubah jaringan sosial menjadi kerja bersama. Suryandhani et al. (2023) menunjukkan bahwa jejaring sebagai bagian dari modal sosial berkaitan dengan pembentukan *collective action* dalam pengembangan desa wisata. Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa hambatan koordinasi di Kemujan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pelatihan teknis. Dibutuhkan mekanisme pembagian peran, kepercayaan, komunikasi, dan agenda bersama yang dapat bertahan setelah program pengabdian berakhir.

Aksi kolektif juga berkaitan dengan kemampuan menetapkan kepentingan bersama di tengah keragaman posisi. Pemuda umum, pemuda yang telah terlibat dalam usaha wisata, pemerintah desa, pemilik usaha, dan kelompok masyarakat tidak selalu memiliki prioritas yang sama. Sebagian mungkin menekankan peningkatan kunjungan, sebagian lain membutuhkan peluang usaha, sementara pihak lain lebih mengkhawatirkan dampak sosial dan lingkungan. Pendampingan tidak menyelesaikan

seluruh perbedaan tersebut, tetapi FGD menyediakan ruang awal untuk membuat kepentingan-kepentingan itu terlihat. Dalam konteks pemberdayaan, kemampuan mendialogkan perbedaan merupakan bagian penting dari kapasitas komunitas karena program bersama hanya dapat berjalan ketika aktor memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing.

Peran pemerintah desa menjadi penting sebagai penghubung antara inisiatif pemuda dan tata kelola lokal. Dukungan pemerintah desa yang muncul selama kegiatan dapat menjadi modal legitimasi bagi tindak lanjut, tetapi dukungan informal perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme yang lebih jelas agar tidak bergantung pada momentum kegiatan. Bentuknya tidak harus selalu berupa organisasi baru; dapat berupa forum komunikasi berkala, penetapan agenda bersama, pembagian penanggung jawab, atau integrasi sebagian rencana aksi ke dalam kegiatan desa yang relevan. Artikel ini tidak menyatakan bahwa mekanisme tersebut telah terbentuk, tetapi mengidentifikasinya sebagai kebutuhan yang logis dari problem koordinasi yang ditemukan selama pendampingan.

Komitmen awal dari pemuda dan pemerintah desa merupakan modal penting, tetapi pada akhir kegiatan komitmen tersebut belum terinstitusionalisasi melalui surat keputusan, nota kesepahaman, atau alokasi anggaran khusus. Karena itu, artikel ini tidak menyatakan bahwa keberlanjutan program telah terjamin. Keberlanjutan masih bergantung pada tindak lanjut lokal, kemampuan menjaga komunikasi antarpihak, serta dukungan kelembagaan desa.

Pada tahap ini, rencana aksi lebih tepat dipahami sebagai perangkat konsolidasi daripada daftar proyek final. Nilai utamanya terletak pada upaya menyatukan aktor yang sebelumnya cenderung bergerak sendiri-sendiri. Bila rencana aksi langsung diarahkan pada program yang terlalu besar, terdapat risiko ketergantungan pada pendanaan eksternal dan menurunnya partisipasi ketika proyek selesai. Sebaliknya, agenda kecil yang realistis—misalnya penguatan arus informasi, koordinasi promosi, kesepakatan pesan lingkungan, atau pembagian peran dalam pelayanan—dapat menjadi sarana membangun kepercayaan. Dari perspektif aksi kolektif, keberlanjutan lebih mungkin terbentuk melalui pengalaman kerja bersama yang berulang daripada melalui komitmen deklaratif semata.

Konteks pulau kecil juga mensyaratkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan. Prasetyo et al. (2024) menunjukkan pentingnya kesadaran ekokultural generasi muda Karimunjawa, sedangkan Sayuti (2023) menekankan kesiapan komunitas dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pariwisata berkelanjutan pulau kecil. Dengan demikian, kerja kolektif di Kemujan perlu diarahkan bukan hanya pada promosi dan pendapatan, tetapi juga pada konservasi, kebersihan, tata kelola kunjungan, serta distribusi manfaat yang lebih kuat bagi masyarakat lokal.

Tabel 5 Indikasi Perubahan yang Teridentifikasi Selama Pendampingan

Aspek	Kondisi Awal yang Teridentifikasi	Indikasi Setelah Proses Pendampingan	Bukti yang Tersedia
Pemahaman potensi	Aset wisata dikenal sebagai bagian keseharian dan belum selalu dinarasikan sebagai pengalaman wisata	Peserta mulai menghubungkan aset alam, budaya, kuliner, dan sosial dengan nilai serta pengalaman destinasi	Catatan pemetaan, diskusi, refleksi
Pelayanan wisata	Belum ada kerangka bersama mengenai informasi, kenyamanan, keamanan, dan pengalaman wisatawan	Muncul pemahaman awal tentang prinsip pelayanan dan gagasan itinerary/paket sederhana	Catatan pelatihan dan simulasi
Promosi digital	Promosi cenderung sporadis dan berorientasi pada unggahan	Peserta mulai membicarakan narasi destinasi, informasi akses, pesan lingkungan, dan konsistensi konten	Catatan pelatihan, diskusi konten
Lingkungan	Kebersihan dan konservasi belum selalu dikaitkan dengan mutu pengalaman wisata	Peserta mulai mengaitkan keberlanjutan wisata dengan kebersihan, mangrove, sampah, dan etika kunjungan	FGD dan refleksi peserta
Kolaborasi	Koordinasi antarpemuda/aktor lokal dinilai sulit dan belum ada rencana kerja bersama yang mapan	Muncul kebutuhan merajut pemuda, pelaku wisata, dan pemerintah desa dalam rencana aksi	Rencana aksi dan catatan komitmen

Tabel 5 memperlihatkan bahwa bukti yang tersedia bersifat prosesual. Karena itu, frasa “mulai memahami”, “muncul kebutuhan”, dan “indikasi penguatan” dipilih secara sengaja untuk menghindari klaim sebab-akibat yang tidak didukung oleh desain evaluasi. Pendekatan ini juga membedakan capaian kegiatan dari pengukuran efektivitas program berbasis eksperimen.

Kapasitas digital dan pelayanan masih memerlukan latihan berulang. Dua kali kunjungan cukup untuk memfasilitasi pemetaan, dialog, dan penyusunan rencana awal, tetapi belum cukup untuk mengamati konsistensi produksi konten, perubahan mutu pelayanan, atau peningkatan manfaat ekonomi. Oleh sebab itu, pendampingan lanjutan sebaiknya berfokus pada implementasi rencana aksi, penguatan koordinasi lokal, dan dokumentasi capaian yang dapat dievaluasi secara berkala.

5 Implikasi Konseptual dan Praktis Kerangka Lima Dimensi

Secara konseptual, pengalaman Kemujan menunjukkan bahwa pendampingan desa wisata lebih produktif ketika kapasitas dipahami sebagai hubungan antardimensi. Program yang hanya menekankan promosi digital berisiko menciptakan ekspektasi tanpa kesiapan pelayanan; program yang hanya menekankan pelayanan dapat kehilangan jangkauan pasar; dan keduanya dapat menghasilkan tekanan baru ketika dimensi lingkungan diabaikan. Kerangka lima dimensi menawarkan cara sederhana untuk menghindari fragmentasi tersebut. Ia tidak menggantikan teori pemberdayaan atau pariwisata berbasis masyarakat, tetapi berfungsi sebagai perangkat operasional untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam agenda pendampingan yang mudah dipahami peserta.

Implikasi kedua berkaitan dengan posisi pemuda. Pendampingan menunjukkan bahwa pemuda sebaiknya tidak ditempatkan hanya sebagai target pelatihan digital. Mereka dapat berfungsi sebagai broker sosial yang menghubungkan aktor, pengetahuan lokal, teknologi, dan kebutuhan wisatawan. Fungsi ini penting terutama ketika struktur ekonomi wisata melibatkan pihak dari dalam maupun luar desa. Agar peran tersebut berkembang, pemuda membutuhkan legitimasi sosial, akses komunikasi dengan pemerintah desa, dan kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan agenda. Dengan

demikian, pemberdayaan pemuda tidak cukup berhenti pada peningkatan keterampilan individu, tetapi perlu memperluas ruang partisipasi mereka dalam tata kelola lokal.

Implikasi ketiga adalah perlunya membedakan output kegiatan dengan outcome jangka menengah. Dalam program ini, output yang dapat ditunjukkan adalah proses pemetaan, partisipasi dalam FGD, penguatan pemahaman awal, serta tersusunnya rencana aksi. Outcome seperti konsistensi promosi, peningkatan mutu pelayanan, pembentukan kelembagaan, peningkatan pendapatan lokal, atau perubahan perilaku lingkungan belum dapat dinyatakan karena memerlukan pengamatan lanjutan. Pembedaan ini penting bagi praktik pengabdian perguruan tinggi agar keberhasilan tidak diukur hanya dari selesainya pelatihan, tetapi juga dari kemampuan merancang sistem pemantauan setelah kegiatan utama berakhir.

Secara praktis, kerangka lima dimensi dapat digunakan sebagai matriks diagnosis awal pada pendampingan berikutnya. Fasilitator dapat menilai bersama peserta: aset apa yang sudah dipahami, aspek pelayanan mana yang paling lemah, bagaimana media digital digunakan, risiko lingkungan apa yang perlu diprioritaskan, dan siapa saja aktor yang perlu dihubungkan. Hasil diagnosis kemudian dapat menentukan urutan kegiatan. Desa yang sudah kuat pada digital tetapi lemah pada koordinasi tidak memerlukan pelatihan konten yang berulang; sebaliknya, desa dengan jejaring kuat tetapi belum memiliki narasi destinasi dapat memulai dari sadar potensi dan digital. Fleksibilitas ini membuat kerangka lebih berguna sebagai alat perencanaan daripada sebagai paket pelatihan yang seragam.

Bagi perguruan tinggi, pendekatan ini menuntut keberanian untuk menempatkan pendampingan sebagai proses yang iteratif. Dua kali kunjungan dapat memulai pemetaan dan konsolidasi, tetapi penguatan kapasitas membutuhkan siklus umpan balik. Pada tahap berikutnya, tim dapat kembali bukan untuk mengulang materi, melainkan memeriksa pelaksanaan rencana aksi, mendokumentasikan hambatan, dan membantu peserta melakukan penyesuaian. Bila desain semacam ini dirancang sejak awal, program pengabdian dapat menghasilkan bukti yang lebih kuat mengenai perubahan proses dan outcome sekaligus tetap menjaga posisi masyarakat sebagai pelaku utama.

6 Keterbatasan Kegiatan dan Arah Tindak Lanjut

Kegiatan ini memiliki empat keterbatasan utama. Pertama, pelaksanaan lapangan dilakukan melalui dua kali kunjungan sehingga belum memungkinkan pengamatan longitudinal terhadap perubahan perilaku dan kelembagaan. Kedua, peserta berjumlah sekitar 35 orang dengan latar beragam dan tidak dimaksudkan sebagai sampel representatif seluruh pemuda Kemujan. Ketiga, evaluasi bersifat kualitatif tanpa pre-test dan post-test sehingga tidak dapat digunakan untuk menyatakan besaran peningkatan secara statistik. Keempat, komitmen tindak lanjut belum terinstitusionalisasi dalam SK, MoU, atau skema pembiayaan khusus.

Keterbatasan tersebut sekaligus menentukan batas klaim kerangka lima dimensi. Kerangka ini merupakan formulasi kontekstual dari pengalaman pendampingan, bukan model yang telah tervalidasi lintarlokasi. Pengujian lebih lanjut membutuhkan pendampingan yang lebih panjang, instrumen evaluasi yang terdokumentasi sejak awal, pelacakan implementasi rencana aksi, dan pembandingan dengan desa wisata lain.

Keterbatasan lain yang perlu dicatat adalah tidak tersedianya profil demografis rinci peserta dan dokumentasi terstruktur mengenai tingkat keterlibatan setiap individu pada seluruh sesi. Kondisi tersebut membatasi kemampuan artikel untuk membandingkan pengalaman antar-kelompok peserta, misalnya antara pemuda yang telah bekerja di sektor wisata dan pemuda umum. Penelitian atau pengabdian lanjutan dapat memperbaiki hal ini dengan mencatat karakteristik peserta sejak awal, tanpa harus mengubah kegiatan menjadi eksperimen. Informasi dasar tersebut akan membantu membaca apakah kebutuhan kapasitas berbeda menurut pengalaman, jenis pekerjaan, atau tingkat keterlibatan dalam pariwisata.

Selain itu, evaluasi lanjutan idealnya tidak hanya mengandalkan persepsi peserta, tetapi memasukkan jejak luaran yang dapat diverifikasi. Contohnya adalah dokumentasi konten yang benar-benar dipublikasikan, konsistensi kalender promosi, penerapan standar informasi sederhana, keterlibatan peserta dalam forum koordinasi, realisasi agenda lingkungan, atau perkembangan rencana aksi. Indikator semacam itu tetap dapat dianalisis secara kualitatif, tetapi memberikan dasar yang lebih kuat untuk menilai apakah perubahan pemahaman berlanjut menjadi praktik.

Tindak lanjut yang realistis adalah memperkuat ruang koordinasi antara pemuda, pemerintah desa, dan pelaku wisata, kemudian memilih agenda yang dapat dikerjakan

dengan sumber daya lokal. Fokus dapat diarahkan pada implementasi rencana aksi, penguatan promosi digital yang konsisten, peningkatan pelayanan dasar, dan kegiatan lingkungan. Yang penting, agenda tersebut dibangun dari kesepakatan lokal, bukan sekadar kelanjutan program universitas.

Bagi perguruan tinggi, pembelajaran utama kegiatan ini adalah perlunya menggeser posisi tim dari penyampai materi menjadi fasilitator yang membantu warga merumuskan masalah dan pilihan tindakan. Pendampingan berikutnya perlu dirancang dengan indikator evaluasi yang lebih kuat sejak awal agar perubahan proses, luaran, dan dampak dapat ditelusuri secara lebih meyakinkan.

Dengan demikian, keberlanjutan program tidak cukup ditopang oleh antusiasme peserta. Ia membutuhkan kelembagaan lokal, komunikasi rutin, pembagian peran, dukungan pemerintah desa, dan mekanisme evaluasi. Komitmen pemuda dan pemerintah desa yang muncul selama kegiatan dapat dipahami sebagai modal awal, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan mengubah komitmen tersebut menjadi praktik kolektif yang stabil.

KESIMPULAN

Pendampingan sadar desa wisata di Desa Kemujan yang dilaksanakan melalui dua kunjungan pada September 2024 dengan sekitar 35 peserta menunjukkan indikasi penguatan cara pandang pemuda terhadap pengelolaan wisata sebagai persoalan yang mencakup aset lokal, pelayanan, digitalisasi, lingkungan, dan kolaborasi. Dari proses pemetaan, pelatihan, FGD, refleksi, dan penyusunan rencana aksi dirumuskan kerangka lima dimensi: sadar potensi, sadar pelayanan, sadar digital, sadar lingkungan, dan sadar kolaborasi. Kelima dimensi tersebut tidak berdiri sendiri. Sadar potensi membantu peserta membaca aset; sadar pelayanan menerjemahkan aset menjadi pengalaman wisata; sadar digital memperluas komunikasi; sadar lingkungan menjaga basis ekologis; sedangkan sadar kolaborasi menghubungkan kapasitas individual menjadi agenda bersama.

Luaran paling konkret kegiatan adalah rencana aksi yang menekankan kebutuhan merajut keterhubungan pemuda, pelaku wisata, dan pemerintah desa, terutama untuk menjawab hambatan koordinasi dan memperkuat posisi masyarakat lokal dalam

pengembangan wisata. FGD juga memperlihatkan bahwa tantangan pemberdayaan tidak hanya berupa keterbatasan keterampilan, tetapi berkaitan dengan struktur hubungan antaraktor dan persepsi peserta mengenai terbatasnya posisi masyarakat lokal dalam sebagian rantai ekonomi wisata. Karena itu, pengembangan desa wisata di Kemujan memerlukan kombinasi antara penguatan keterampilan, ruang komunikasi, dukungan pemerintah desa, dan kesadaran ekologis.

Temuan tidak dimaksudkan sebagai bukti peningkatan kuantitatif karena kegiatan tidak menggunakan pre-test/post-test dan belum mengukur dampak jangka panjang. Kerangka lima dimensi harus dipahami sebagai formulasi kontekstual yang lahir dari proses pendampingan, bukan model universal yang telah tervalidasi. Replikasi pada lokasi lain memerlukan penyesuaian terhadap karakter aset, aktor, akses digital, kerentanan lingkungan, dan kapasitas kelembagaan setempat. Untuk memperkuat validitas praktisnya, program lanjutan perlu menggunakan dokumentasi indikator sejak awal, melakukan pemantauan terhadap implementasi rencana aksi, serta membedakan secara jelas output kegiatan dari outcome jangka menengah. Dengan syarat tersebut, kerangka lima dimensi dapat berfungsi sebagai alat diagnosis dan perencanaan pendampingan yang mengintegrasikan pemberdayaan pemuda dengan tata kelola desa wisata yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat statistik Kabupaten Jepara. (2023, November 1). *Kunjungan wisatawan mancanegara pada September 2023 tumbuh 52,76 persen bila dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu*. Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Pressrelease/2023/11/01/2047/Kunjungan-Wisatawan-Mancanegara-Pada-September-2023-Tumbuh-52-76-Persen-Bila-Dibandingkan-Bulan-Yang-Sama-Pada-Tahun-Lalu.Html

Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(4), 355–369. https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414

Delbecq, A. L., & Van de Ven, A. H. (1971). A Group Process Model for Problem Identification and Program Planning. *The Journal of Applied Behavioral Science*, *7*(4), 466–492. https://doi.org/10.1177/002188637100700404

Kiss, B., Sekulova, F., Hörschelmann, K., Salk, C. F., Takahashi, W., & Wamsler, C. (2022). Citizen participation in the governance of nature-based solutions. Environmental Policy and Governance, 32(3), 247–272. https://doi.org/10.1002/eet.1987

Kurniawan, F. S., Winarni, E., Retnandari, S. D., & Widilestari, C. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Soft Skill Digital Marketing di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa. *Manggali*, *3*(1), 1. https://doi.org/10.31331/manggali.v3i1.2353

Mullen, C. A., & Klimaitis, C. C. (2021). Defining mentoring: a literature review of issues, types, and applications. *Annals of the New York Academy of Sciences*, *1483*(1), 19–35. https://doi.org/10.1111/nyas.14176

Nurhasanah, I. S., & Van den Broeck, P. (2022). Towards a Sustainable Metamorphosis of a Small Island Tourism: Dynamizing Capacity Building, Alternating Governance Arrangements, and Emerging Political Bargaining Power. *Sustainability*, *14*(12), 6957. https://doi.org/10.3390/su14126957

Pinem, R., Listyorini, S., Purbawati, D., & Ainuddin, I. (2021). The Impact of the Covid-19 Pandemic along with the Development of Sustainable Tourism and Tourism 4.0 in New Normal Covid-19 Pandemic in Karimunjawa. *Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2020, 9-10 October 2020, Semarang, Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304797

Prasetyo, K. B., Yulianto, H. J., & Soeharso, S. (2024). Strengthening Language and Eco-Cultural Literacy of the Young Generation to Support International Tourism in Karimunjawa. *Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *9*(2), 230. https://doi.org/10.24235/empower.v9i2.18658

Purwowidhu, C. S. (2023, May 16). *Kian melesat di 2023, pariwisata Indonesia bersiap menuju level prapandemi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id/Article/Show/Kian-Melesat-Di-2023-Pariwisata-Indonesia-Bersiap-Menuju-Level-Prapandemi

Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165.

Sayuti, R. H. (2023). Community Readiness in Implementing Sustainable Tourism on Small Islands: Evidence from Lombok, Indonesia. *Sustainability*, *15*(12), 9725. https://doi.org/10.3390/su15129725

Suryandhani, A. R., Prayitno, G., & Surjono, S. (2023). Relationship of Social Capital and Collective Action in The Development of Tourism Village. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, *3*(1), 1–18. https://doi.org/10.21580/prosperity.2023.3.1.14744

Tuten, T. L. (2023). *Social Media Marketing*. SAGE Publisher.